

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI TALAUD TENTANG MERELOKASI PASAR TRADISIONAL LIRUNG DIKECAMATAN LIRUNG

*Ones Awaeh<sup>1</sup>*  
*Novie R. Pioh<sup>2</sup>*  
*Josef Kairupan<sup>3</sup>*

### Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung DiKecamatan Lirung menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan dan SK Bupati Talaud Nomor : 363 Tahun 2015, Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung DiKecamatan Lirung menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan dan SK Bupati Talaud Nomor : 363 Tahun 2015, Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward dalam tulisan Mustafa lutfi dan Kurniawan ( 21012:121-125). Penelitian Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung DiKecamatan Lirung. Dalam .Hal ini ada 3 faktor dari 4 faktor yang penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : Komunikasi, Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Sumber Daya,a. Sumber Daya Manusia ,Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. b. Sumber Daya Non Manusia, Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi relokasi pasar lirung kekurangan sumber daya pendukung. Disposisi(sikap/perilaku), Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.

**Kata Kunci : Impelementasi Kebijakan Bupati Talaud**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Pasar tradisional secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, pasar tradisional juga sebagai bagian dari usaha sektor informal dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja masyarakat, terutama bagi sebagian masyarakat yang kurang memiliki keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Pedagang yang ada dipasar tradisional biasanya memperdagangkan bahan-bahan dari hasil/usaha sendiri seperti pertanian, perikanan atau hasil usaha nelayan.

Relokasi/Peralihan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pasar tradisional akan tetap ada dengan seiring berkembangnya sekarang pasar modern. Untuk itu, Menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan. Bab VII, Pasal 18 menyatakan Ketentuan Peralihan pasar tradisional harus memperhatikan hal sebagai berikut:

Pasar tradisional lirung merupakan pasar yang berada di pusat kecamatan lirung kabupaten kepulauan talaud, yang pedagangnya berasal dari luar kecamatan lirung dan juga penduduk asli kecamatan lirung. Pasar tradisional lirung dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud, melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kabupaten kepulauan talaud. Karena letaknya berada di pusat kecamatan lirung, sehingga pemerintah daerah berinisiatif untuk melakukan perubahan pasar tradisional menjadi pasar modern, oleh karena itu pemerintah daerah selaku pangambil keputusan bersama

dinas perindustrian perdagangan dan koperasi yang di dalamnya bidang pengelola pasar melakukan relokasi pasar tradisional lirung, karena di anggap keberadaan pasar sudah tidak layak lagi di tempati, tempat yang sudah kumuh dan menyebabkan kemacetan, maka dari itu pemerintah daerah yakni instansi terkait dalam hal ini Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi mengambil langkah untuk merelokasi pasar tradisional lirung ke pasar yang baru, yang lebih bersih dan layak di tempati oleh pedagang.

Kemudian Permasalahan yang ada tentang pelaksanaan pemerintah daerah dalam merelokasi pasar tradisional lirung, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya : Komunikasi, kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pelaksana kebijakan dengan pelaku kebijakan, karena kelalian dari pembuat kebijakan yaitu Disperdag, sangat jelas bahwa informasi yang di sampaikan oleh pelaksana kebijakan kepada pelaku kebijakan di pasar tradisional lirung kurang bisa di pahami dengan jelas apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan tersebut, sehingga pelaku kebijakan belum dapat mempersiapkan hal-hal yang bisa mendukung proses implementasi. Sumber Daya, sebagian pedagang menerima dengan adanya relokasi di pasar tradisional lirung, kemudian ada juga yang tidak menerima relokasi pasar tersebut. Karena mereka menganggap bahwa dengan adanya relokasi akan mengurangi pendapatan mereka, kurangnya sumber daya yang ada sangat berpengaruh terhadap proses perdagangan, karena kurangnya pembeli yang datang ke pasar, sehingga mereka masih bertahan di pasar lama karena lebih mudah di jangkau, sebab tanpa sumber daya manusia sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan proses implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Disposisi atau perilaku, sikap pelaku kebijakan yakni pedagang pasar sangat penting dalam proses implementasi kebijakan, karena jika sikap dari pelaku kebijakan yang tidak melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan maka proses implementasi akan berjalan lambat, sikap dari pedagang pasar yang keras kepala dan masih bertahan di pasar sangat mengganggu proses implementasi, karena masih ada sebagian pedagang yang bertahan dan berdagang di pasar, sedangkan pedagang lainnya sudah mengikuti aturan dalam hal relokasi. Karena sikap dan perilaku dari pelaku kebijakan yang tidak mengikuti kebijakan relokasi akan sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan tentang relokasi pasar tradisional lirung.

## Tinjauan Pustaka

George Edward III dalam tulisan Mustafa lutfi dan Kurniawan (2012: 21-125 ) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak factor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh factor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :

1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan ?
2. Apakah yang menjadi factor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan ?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, George Edward dalam tulisan Mustafa lutfi dan Kurniawan (2012:121-125) mengajukan empat factor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan

menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang di sampaikan harus konsistensi sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

## 2. Sumber Daya

Sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dalam konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan- aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

## 3. Disposisi atau Perilaku

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter

penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah di gariskan. Sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Apabila struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah di buat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur yang rumit, kompleks dan selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam teori yang dipaparkan mengenai implementasi kebijakan oleh George Edward III (1980) dalam tulisan Mustafa lutfi dan Kurniawan

(2012:121-125) ini, dijadikan oleh peneliti sebagai teori dasar yang melandasi dan membangun penelitian ini, karena di pandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu menggali keberhasilan ataupun kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah untuk merelokasi pasar tradisional lirung.

Teori dari George Edward III (1980) yang akan di gunakan untuk menjadi landasan proses penelitian ini, karena dirasa sesuai dengan masalah relokasi di pasar tradisional lirung.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplemntasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu: langsung mengimplemntasikan dalam bentuk program atau melalui formasi kebijakan atau turunan dari kebijakan public tersebut. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Ancaman utama dari implemntasi kebijakan adalah inkonsistensi implementasi. Dalam pelaksanaannya kemungkinan bias terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Masalah implementasi ini berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan dengan realisasi dari kebijakan tersebut. Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach ( dalam Agustino, 2008 : 138 ) melukiskan kerumitan dalam proses implementasi pernyataan sebagai berikut : “adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang

kedengaranya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarnya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan orang termasuk mereka anggap klien”

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2000). Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas, menggambarkan atau melukiskan keadaan objektif/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Metode kualitatif merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian konsektual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

## Fokus Penelitian

Dari teori yang di paparkan oleh Edward III mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor ini dijadikan peneliti sebagai teori dasar yang melandasi dan membangun penelitian ini, karena di pandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Dalam hal ini yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi/perilaku dan struktur birokrasi.

## Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian adalah : Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi Melonguane  
Kabupaten Kepulauan Talaud (Pasar  
Tradisional Lirung lama dan baru)

Informan Penelitian

Didalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud
- b. Pedagang Pasar
- c. Masyarakat/Konsumen
- d. Mandor/petugas pasar

## Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan jawaban informan menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan tentang relokasi pasar tradisional lirung turut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan, sebagaimana teori yang dipaparkan George Edward III (1980) dalam tulisan Mustafa lutfi dan Kurniawan (2012:21-125) implementasi kebijakan ialah suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut ialah:

### 1. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan tentang relokasi pasar tradisional lirung adalah faktor komunikasi. Dalam pelaksanaan kebijakan komunikasi sangatlah penting, proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi perlu disampaikan kepada pelaku

kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan kebijakan untuk merelokasi pasar tradisional lirung ini masih belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat di wilayah kecamatan lirung khususnya para pedagang di pasar tradisional lirung, sebagaimana yang di katakan oleh bapak Kabid J.P : “komunikasi sudah jalan, sudah ada sosialisasi yang di lakukan oleh pemda khususnya dinas perinda dalam pelaksanaan relokasi, tetapi tidak semua masyarakat atau pedagang memahami dengan baik informasi yang di sampaikan oleh dinas perinda apa yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan relokasi pasar lirung” . Selain itu, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat pelaksanaan relokasinya karena masih ada sebagian pedagang yang bertahan di pasar, sedangkan pedagang lainnya sudah mau di relokasi asalkan semua pedagang di pasar tradisional lirung di relokasi ke pasar baru yang sudah di sediakan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa isi dan tujuan dari kebijakan jelas hanya saja belum dipersiapkan secara detail dan belum bisa di pahami dengan baik oleh masyarakat serta pedagang di pasar tradisional lirung. Kondisi ini menyebabkan proses implementasi tidak bisa terealisasi atau tidak terlaksana sepenuhnya.

### 2. Sumber daya

Sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

#### a. Sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

#### b. Sumber daya non manusia

sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti kios-kios, meja dan tempat yang kurang memadai untuk di tempati menjadi salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan kegiatan pasar.

Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan relokasi pasar lirung masih kurang efektif serta kualitas sumber daya manusia belum profesionalitas. Buktinya sampai saat ini pelaksanaan implementasi kebijakan untuk merelokasi pasar tradisional lirung ini tidak berjalan dengan optimal karena masih ada pedagang yang bertahan di

pasar lama, seperti yang di katakan oleh bapak B.W: “tidak semua pedagang melaksanakan aturan relokasi untuk pindah ke pasar baru, buktinya ketika mereka sudah pindah masih ada yang berjualan di pasar lama, sehingga muncul ketidakadilan bagi pedagang di pasar dan fasilitasnya kurang memadai kurangnya sarana prasarana di pasar baru”.Kondisi semacam ini menyebabkan kurangnya sumber daya manusia untuk di lakukan relokasi.

#### 3. Disposisi (Sikap/Perilaku)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan. Sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk dapat menjalankan kewenangan ini, maka dibutuhkan komitmen dan kemauan yang tinggi dari Bupati talaud dan kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kabupaten kepulauan talaud yang di dalamnya bersama-sama dengan Kabid Pengelolaan pasar untuk dapat merelokasi kembali pasar tradisional

lirung, dengan secara detail dan tertata baik juga bisa dapat melihat beberapa hal yang masih kurang seperti fasilitas yang masih kurang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap isi dan ketentuan didalamnya dengan memperhatikan situasi dan sikap dari pedagang pasar yang tidak mengikuti aturan dari pada relokasi, sesuai yang di katakan oleh bapak Y.P: “kami pedagang yang di dalam pasar sudah mengikuti aturan relokasi pasar sudah pindah, tetapi ada sebagian pedagang pasar yang di sekitaran pasar tidak mengikuti aturan relokasi yang sudah di laksanakan oleh pemerintah daerah, maka dari itu harus semua yang di relokasi”.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai hasil penelitian dari ke tiga faktor yang menjadi fokus dalam penelitian terdapat kendala dalam implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional lirung, yakni di lihat dari Komunikasi, di mana dari pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai relokasi pasar lirung, tetapi masalahnya, karena pedagang tidak mendengar dan memahami dengan baik informasi tentang relokasi yang di sampaikan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait yakni Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi, sehingga penyampaian informasinya tidak merata, sehingga masih belum bisa memahami dengan baik tujuan dari relokasi karena kurangnya informasi. Sumber daya manusia, salah satu kendala dalam implementasi kebijakan relokasi pasar lirung adalah sumber daya manusia yang tidak efektif dalam mengikuti aturan untuk merelokasi pasar tradisional lirung, dimana masih ada pedagang yang tidak melaksanakan

kebijakan relokasi pasar lirung, sehingga proses implementasi kebijakan berjalan lambat karena tidak di dukung oleh sumber daya manusia. Disposisi atau sikap, yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan relokasi adalah sikap pedagang yang tidak profesionalitas dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai pelaksana kebijakan relokasi pasar lirung, sehingga mempengaruhi proses implementasi kebijakan menjadi tidak optimal. Dalam implementasi kebijakan yang memiliki kendala atau masalah tentu dibutuhkan solusi yang baik. Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan pedagang di pasar lirung, bersama-sama melaksanakan forum diskusi untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di pasar tradisional lirung. Solusi untuk komunikasi yaitu, bagaimana pelaksana penyampaian informasi lebih merata lagi agar dapat mudah dipahami dan dimengertidengan baik dan lebih jelas kepada kelompok sasaran, Lebih efektif untuk meningkatkan Sumber daya (SDM) agar tidak memperlambat implementasi kebijakan yang sudah diatur, kemudian untuk sikap dari pelaksana menjunjung tinggi profesionalitas dan komitmen yang tinggi, serta mengikuti dengan baik aturan relokasi agar cepat mampu menjalankan kebijakan yang sudah diatur agar tidak menimbulkan masalah.

Pada subpoint ini peneliti akan membahas terkait hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Untuk Merelokasi Pasar Tradisional Lirung Di Kecamatan Lirung, yang terdapat pada subpoint sebelumnya, dengan menyesuakannya dengan teori-teori yang berada di dalam literatur model implementasi George C.

Edward III. Adapun pembahasan terkait hasil tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengandemikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehinggapelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pelaksana dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

## 2. Sumber Daya

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor Sumber daya yang terdapat dalam implementasi kebijakan bupati talaud untuk merelokasi pasar tradisional lirung, peneliti juga akan menjabarkan kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat dalam faktor sumber daya. Dua indikator tersebut antara lain:

### a. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas,

dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya manusia (pedagang) yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pasar adalah pedagang yang merupakan sebagai pelaksana kebijakan yang melaksanakan tanggung jawab serta tugas yang di berikan oleh pembuat kebijakan seperti mengikuti relokasi pasar untuk pindah ke pasar yang baru karena pasar lama akan dijadikan pasar modern oleh pemerintah daerah.

### b. Sumber Daya Non Manusia

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi relokasi pasar lirung kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti kios-kios, meja dan tempat yang kurang memadai untuk di tempati menjadi salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan kegiatan pasar. Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan kebijakan untuk merelokasi pasar tradisional lirung belum terpenuhi dengan baik. Menurut George C. Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya non manusia berupa sarana prasarana merupakan hal yang penting

dalam implementasi, apabila seseorang pelaksana memiliki anggota yang memadai, memahami apa yang harus dilakukan, tetapi tanpa adanya sarana prasarana yang mendukung maka implementasi yang dilaksanakan tidak akan berhasil karena kekurangan sarana prasarana yang dibutuhkan akan menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sarana prasarana yang ada di pasar tradisional lirung yang baru sudah ada, hanya saja dari sisi jumlah belum sebanding antara fasilitas yang tersedia dengan jumlah pedagang yang ada. Sehingga hal ini belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya non manusia berupa sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam implementasi.

### 3. Disposisi/Perilaku

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan untuk merelokasi pasar tradisional lirung cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini selalu siap untuk melaksanakan kebijakan relokasi pasar lirung untuk membangun perekonomian di Kabupaten Kepulauan Talaud. Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi selaku perpanjangan tangan dari Bupati Talaud selalu siap

mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan relokasi pasar tradisional lirung. Namun, permasalahan yang terjadi sampai saat ini menimbulkan pertanyaan yang besar tentang kebijakan relokasi pasar yang kurangnya perencanaan yang matang. Sebaiknya implementasi kebijakan relokasi pasar lirung dilaksanakan setelah tercapainya kesiapan dari seluruh pedagang pasar dan masyarakat. Kesiapan pedagang sangat penting dalam pengimplementasian relokasi pasar lirung, karena pedagang sebagai penentu keberhasilan relokasi pasar yang diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap berbagai kemungkinan terjadinya perubahan. Maka dari itu perlu adanya persiapan yang matang dari pemerintah dalam setiap sistem yang diperlukan untuk pelaksanaan relokasi pasar lirung. Berdasarkan hal di atas, peneliti menyimpulkan jika para implementor bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Demikian pula apabila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Namun ketika suatu kebijakan diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari pembuat kebijakan dan harus serius menyikapi permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan relokasi pasar lirung. Karena Implikasi yang akan terjadi dalam implementasi kebijakan relokasi pasar lirung kedepannya jika hal tersebut dibiarkan, akan menjadi sebuah tradisi aparat pelaksana yang tidak baik dan menyebabkan

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan.

## Kesimpulan

1. Belum optimalnya Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Relokasi Pasar yaitu sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Talaud No: 363, dimana upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud masih sangat minim. Belum dilaksanakannya secara keseluruhan karena sampai saat ini pemerintah daerah belum bisa melakukan relokasi tepat sasaran, sehingga relokasi serta penggunaan pasar baru tidak berjalan sesuai apa yang di harapkan oleh pelaku kebijakan.
2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung, adalah:
  - 1) Faktor Komunikasi Belum optimalnya implementasi kebijakan tentang relokasi pasar lirung tersebut karena kurangnya koordinasi (kerjasama) yang baik dari semua pihak-pihak yang ada baik: yang mengeluarkan kebijakan, yang menjalankan dan juga yang menerima kebijakan tersebut. Hal ini karena adanya kelalaian dan kurang konsistennya pelaksana kebijakan.
  - 2) Faktor Sumber Daya (Sumber Daya Manusia) Belum optimalnya implementasi kebijakan tentang relokasi pasar tradisional lirung tersebut karena dalam pelaksanaannya pihak-pihak yang menjalankan kebijakan tersebut belum sepenuhnya bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini mengakibatkan penyelesaian

relokasi pasar lirung semakin sulit.

- 3) Faktor Disposisi (Sikap dari pelaksana kebijakan) Belum optimalnya implementasi kebijakan tentang relokasi pasar tradisional lirung tersebut karena dalam pelaksanaannya semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi melalui koordinasi dan sinergitas masing-masing lembaga dengan mengabaikan berbagai kepentingan sektoral masing-masing lembaga. Hal ini mengakibatkan penyelesaian relokasi pasar lirung semakin sulit.
3. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi yang ditugaskan untuk menjadi pelaksanaan kebijakan harus siap dan juga pihak dari Bidang pengelola pasar juga membantu dalam pelaksanaan teknis dalam merelokasi para pedagang yang ada di pasar tradisional lirung. Melalui anggaran tersebut seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud lebih memperhatikan mengenai pengembangan, pengelolaan serta pelestarian pasar yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemerintah hendaknya memperhatikan segala faktor-faktor pendukung yang ada di pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud, seperti Pemerintah harus memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada.

## Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi perlu

membentuk tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, Bidang Pengelola pasar, Tokoh Masyarakat, yang berfungsi untuk mensosialisasikan tentang Relokasi pasar tradisional lirung sehingga proses ini dapat terus berlangsung dan sosialisasi ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan media masa yang ada, seperti media cetak maupun elektronik yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Faktor penghambat implementasi kebijakan tentang merelokasi pasar tradisional lirung, ini dapat diatasi dengan:

1) Perlu melakukan pertemuan bersama/koordinasi antara pihak yang mengeluarkan kebijakan yaitu Bupati, yang menjalankan kebijakan (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi) untuk membicarakan kembali bagaimana rencana tentang relokasi pasar tradisional agar lebih tepat sasaran, karena faktanya kalau kebijakan ini dilaksanakan akan menimbulkan konflik di masyarakat karena ada yang menerima relokasi ada juga yang tidak menerima relokasi.

2) Pemerintah lebih bertanggung jawab dan lebih berantusias dalam melaksanakan kebijakan dengan memperhatikan setiap tugas, pokok dan fungsi yang diatur dalam perundang-undangan terkait penyelesaian relokasi pasar tradisional lirung.

3) Semua lembaga yang terkait dengan pelaksanaan relokasi lebih mengoptimalkan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada agar kelembagaan dalam

pengurusan permasalahan merelokasi pasar tradisional lirung ini lebih terarah dengan baik dan mendapatkan langkah akhir yang baik.

3. Hendaknya Pemerintah daerah ataupun pihak-pihak yang menjalankan kebijakan tentang relokasi pasar tradisional lirung memiliki sikap, karakter, serta komitmen dan kemauan yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan pasar tradisional lirung ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Endrawanti, S. 2012. Dampak Relokasi Pasar (Studi Kasus di Pasar Sampangan Kota Semarang). Semarang : Jurnal Ilmiah UNTA.
- George Edward III (1980) dalam Erwan Agus Purwanto, Ph.D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si 2015 (hal 85). Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia), Yogyakarta : Gava Media.
- Irawan, D. R. 2015. Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Bonggoeya Kendari. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHO. Kendari.
- Leo 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta.
- Musthofa, Z. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Pemukiman di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta). Skripsi. Surakarta: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.
- Meleong, J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung

Peraturan Daerah No.9 Tahun 2012  
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar  
Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ritonga, M.T, dkk. Ekonomi untuk  
SMA/MA kelas X. PT. Gelora  
Aksara Pratama. Jakarta.

RI. No. 112 tahun 2007 Tentang  
Penataan dan Pembinaan Pasar  
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan  
toko Modern.

Setyaningsih, A dan Susilo, Y.S. 2014.  
Dampak Sosial Ekonomi Relokasi  
Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa dan  
Tanaman Hias Yogyakarta  
(PASTY). Jurnal EP18187.

Sari, R. K. 2006. Sistem Penentuan  
Daerah Relokasi Pemukiman

Masyarakat Di Kota Banda Aceh  
Berbasis Sistem Informasi Geografis.  
Jurnal Fakultas Teknologi Industri  
Jurusan Teknik Informatika  
Universitas Gunadarma.

Sugiyono 2007. Metode Penelitian  
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  
Bandung: Alfabeta.

SK Bupati Talaud Nomor: 363 Tahun  
2015, Tentang Penetapan Status  
Penggunaan Barang Milik Daerah  
Kabupaten Kepulauan Talaud.

Widodo, T. 2013. Studi tentang Peranan  
Unit Pasar dalam Pengelolaan  
Sampah di Pasar Merdeka Kota  
Samarinda. E.Journal Administrasi  
Negara.